DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

A. Zainal, dkk, *Hukum Pidana*, Makasar: Taufiq, 1962.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

-------, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Muda Hukum Pidana di Indonesia)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

------, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

-------, *Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, 2009.

-------, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

-------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Prenada Media Group, 2011.

-------, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.

--------, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

--------, RUU KUHP: *Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Nurhadi MA, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.

Bernadinus Steni dan Susilaningtias, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

--------, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hatta, Moh., *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hudson, B. A. *Penal Policy and Social Justice.* Basingstoke: Macmillan, 1993. http://www.sagepublications.com.

I.B.R. Suopancana dkk, *Penyelesaian Sengketa-Sengketa di Bidang Pertambangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan HAM, 2009.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004.

Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.

Lapenna, Ivo, *Soviet Penal Policy*, Bow Street, London, WC2 by William Clowes & Sons Ltd, Beccles Set in Monotype Plantin First published in 1968. Republised by www.kehlet.com and Birthe Lapenna in Denmark December 2000.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Marston, Greg and Rob Watts, *Tampering with Evidence: A Crtical Appraisal of Evidence-Based Policy-Making (Merusak Bukti: Sebuah Penilaian Kritis tentang Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti*, 2003,diakses http://www.australianreview.net/journal/v3/n3/marston_watts.pdf,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

----------, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

-------, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Jakarta: Kencana, 2012.

-------, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.

Mulyono, Jeffrey, *Tinjauan Batubara Indonesia*, Kursus Intensif Hukum Pertambangan, EMLI Indonesia, Jakarta: 30 Januari-3 Februari 2012.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Prodjokoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.

Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sembiring, Simon Felix, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Sholehuddin, M., *Sisitem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 19860.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

---------, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 2009.

---------, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1983.

Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Suharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Transito, 1982.

Susanto, I.S., *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sutedi, Andrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, 2011.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Tresna, R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limeted, 1959.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA, 2002.

Jurnal/Laporan Penelitian/Artikel

Ade Adhari, Aghisni Panji dan Elfi Indra, *Renegosiasi Kontrak Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait dengan Nilai Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia,* 2012, Laporan Penelitian sebagai Peserta Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia (PPRI) 2012 LIPI.

British Geological Survey, *World Mineral Production 2004-2008*.

Indonesian Coal Book-APBI dan Petromindo.com 2010.

International Copper Study Group, *The World Copper Factbook 2010*.

Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Achmad Taufik, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 22/2002, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.

Laporan Bank Dunia (World Bank) *Treasure or Trouble? Mining In Developing Countries"*, laporan Tahun 2002.

Lembaga Penelitian SMERU (*The SMERU Research Institute*), *Bridging Research and Policy Through Evidence-Based Policy Advocacy*, Newsletter, No. 32 Sep-Decs/2011.

Soedarso, Bambang Prabowo, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, Vol.6 No. 3, April 2009.

Sylvana Maria Apituley, dkk, *Peran Representasi Fungsi Legislasi: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Demos, 2012),

<u>Peraturan Perundang-Undangan</u>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Lain

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/II/2008-2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007

Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.29/Pres/5/2005 Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Tatib DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005-2006

Tatib DPR RI No 1 Tahun 2009-2014

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Naskah *Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* 2004

Konsep KUHP 2012

Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Risalah Rapat Kerja (Raker) Pansus Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Tertanggal 29 Juni 2005; 4 Juli 2005; 18-19 Januari 2006; 25-26 Januari 2006; 1-2 Februari 2006; 8-9 Februari 2006; 15-16 Februari 2006; 22-23 Februari 2006; 1-2 Maret 2006; 15 Maret 2006; 4, 10, 17 dan 24 Mei 2006.

Risalah Rapat Panitia Kerja Pansus Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Tertanggal 24 Agustus 2005; 21-22 Juni 2006; 5-6 Juli 2006; 23 Juli 2006; 13 September 2006.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 24 Agustus 2005; 31 Agustus 2005; 5, 7, 12, 14, 19 dan 21 September 2005; 27 Oktober 2005; 21 November 2005.